

Ketika Sanksi Memicu Amarah: Respons Emosional Siswa sebagai Cermin Perubahan Zaman dan Tantangan Guru

Oleh: Allan Setyoko
(Pranata Humas Ahli Madya Kanwil Kemenag Provinsi Jambi)

Pendahuluan

Dalam sepuluh tahun terakhir, berita mengenai perdebatan antara murid dan guru semakin banyak terdengar di masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang sering terjadi adalah kemarahan para siswa atau orang tua siswa setelah guru memberikan hukuman disiplin. Di Jambi, misalnya, masyarakat terkejut karena adanya kasus siswa yang sangat marah setelah diingatkan oleh guru, yang akhirnya menyebabkan perdebatan yang berlangsung lama antara pihak sekolah dan keluarga. Kasus serupa juga terjadi di berbagai tempat lain, mulai dari Jawa hingga Sulawesi, dengan bentuk dan tingkat keparahan yang berbeda-beda.

Fenomena ini sering dipahami secara normatif. Siswa dianggap tidak mengetahui sopan santun, guru dianggap menjadi korban menurunnya moral, atau sebaliknya, guru dituduh tidak peka dan melanggar hak anak. Dua posisi ini menguasai pembicaraan umum, tetapi keduanya biasanya membuat persoalan menjadi lebih sederhana.

Artikel ini muncul dari rasa khawatir akademik terhadap cara membaca yang tidak dalam tersebut. Pertanyaan yang diajukan bukan hanya tentang mengapa siswa mudah marah, tetapi juga apa yang berubah dalam hubungan pendidikan sehingga sanksi yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari disiplin kini justru menyebabkan konflik emosional. Pertanyaan ini mengajak kita melebihi isu pribadi ke analisis struktur dan budaya.

Artikel ini berbeda dari penelitian lain yang menganggap perasaan siswa hanya sebagai masalah psikologis. Di sini, perasaan dianggap sebagai hasil dari hubungan sosial dan kebijakan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kemarahan para siswa dianggap sebagai tanda perubahan

zaman yang menantang cara pengajaran yang biasa digunakan sebelumnya.

Disiplin Sekolah dan Perubahan Maknanya

Dalam pendidikan modern di awalnya, disiplin di sekolah dibuat berdasarkan hubungan hierarkis yang relatif tetap. Guru mempunyai otoritas yang diakui secara simbolis dan resmi, dan hal ini jarang dipertanyakan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan ini mengalami perubahan yang cukup besar seiring dengan berubahnya pola sosial dan budaya (Sakhiyya & Mulya, 2023).

Di Indonesia, perubahan ini didukung oleh pembahasan mengenai hak anak, demokratisasi dalam pendidikan, serta akses yang lebih luas terhadap informasi. Sanksi yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter kini sering diartikan sebagai bentuk kekerasan simbolik atau pelanggaran hak.

Masalahnya, perubahan ini tidak selalu diiringi dengan perubahan cara berpikir atau pendekatan dalam pembelajaran di sekolah. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan masih menerapkan cara penegakan disiplin yang lama, meskipun lingkungan sosial sekarang sudah berbeda.

Emosi Siswa sebagai Produk Relasi Sosial

Penelitian di bidang sosiologi pendidikan dan psikologi kritis menunjukkan bahwa perasaan para siswa tidak bisa dipisahkan dari hubungan dan struktur yang ada di sekitar mereka (Raihani, 2020). Kemarahan para siswa terhadap sanksi sering kali menunjukkan perasaan bahwa mereka tidak didengar, merasa malu, atau dianggap tidak adil.

Misalnya, di Jambi, kemarahan para siswa tidak terjadi sendirian. Ia muncul dalam situasi komunikasi yang tidak seimbang, kurangnya ruang untuk berbicara, dan keterlibatan orang tua yang justru memperparah permasalahan. Polanya juga bisa ditemukan di kasus lain di berbagai tempat, menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik.

Guru di Tengah Tekanan Zaman

Guru berada pada posisi paradoksal. Di satu sisi, mereka wajib mempertahankan ketertiban dan nilai moral. Di sisi lain, mereka bekerja dalam sistem yang semakin membatasi wewenang mengajar mereka (Sulisworo et al., 2017). Ketika ada konflik, guru sering kali jadi pihak yang paling mudah terkena dampak, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis.

Tekanan dari pihak administratif, ketidakjelasan dalam perlindungan hukum, serta harapan masyarakat yang bertolak belakang membuat banyak guru menjadi lebih hati-hati dan defensif. Dalam situasi seperti ini, tindakan disiplin lebih sering dilakukan dengan cara prosedural, bukan melalui perbincangan, yang justru meningkatkan kemungkinan timbulnya konflik perasaan.

Kasus-Kasus Konflik sebagai Cermin Struktural

Kasus di Jambi, serta beberapa kasus serupa di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, menunjukkan pola yang sama terus-menerus:

1. Sanksi diberikan tanpa ruang dialog.
2. Siswa merespons dengan emosi intens.
3. Konflik semakin meluas melalui orang tua dan media sosial.
4. Guru kehilangan perlindungan simbolik dan institusional.

Pola ini menunjukkan bahwa masalahnya tidak hanya terletak pada siswa yang sering marah, tetapi juga terkait dengan ketidakmampuan sistem pendidikan dalam memandu pengelolaan emosi sebagai bagian dari pembelajaran.

Penutup

Kemarahan para siswa terhadap sanksi bukanlah hal yang tidak biasa, melainkan mencerminkan perubahan zaman yang belum sepenuhnya diakui oleh sistem pendidikan Indonesia. Selama disiplin dianggap hanya

sebagai cara mengontrol, bukan sebagai bentuk komunikasi dua arah, masalah perasaan negatif akan terus berulang.

Tantangan utama dalam pendidikan Indonesia bukan hanya tentang mengatur kelakuan siswa, tetapi juga tentang membangun hubungan antara guru dan siswa yang bisa mengelola perasaan, kekuasaan, dan keadilan secara seimbang.

Daftar Pustaka

- Raihani, R. (2020). A model of Islamic teacher education for social justice in Indonesia.
https://opal.latrobe.edu.au/articles/journal_contribution/A_model_of_Islamic_teacher_education_for_social_justice_in_Indonesia_a_critical_pedagogy_perspective/13776214
- Sakhiyya, Z., & Mulya, T. W. (2023). Education in Indonesia: A critical introduction. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-1878-2_1
- Sulisworo, D., Nasir, R., & Maryani, I. (2017). Identification of teachers' problems in Indonesia.
<https://www.academia.edu/download/114802573/1519-5338-1-PB.pdf>
- Putri, D. (2025). The impact of social inequality on educational quality in Indonesia.
<https://journal.walideminstitute.com/index.php/sujiem/article/view/248>